



Belum Tuntaskan Penyaluran DBH 2024

Belum Tuntaskan Penyaluran DBH 2024

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Makassar belum menerima Dana Bagi Hasil (DBH) secara penuh hingga akhir 2024.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyebutkan, penyaluran DBH oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel baru mencakup empat bulan dari total yang seharusnya diterima sepanjang tahun 2024.



► *Ke Halaman 7*

MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO

Belum Tuntaskan Penyaluran DBH 2024

► *dari Halaman 1*

"Dana Bagi Hasil kami baru dibayar empat bulan. Kalau rata-rata Rp30 miliar per bulan, berarti masih ada sekitar Rp270 miliar yang belum dibayarkan. Padahal, itu hak kami yang sudah masuk dalam neraca keuangan Pemkot Makassar," tegasnya, saat refleksi akhir tahun.

Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny Pomanto ini menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak dari tertundanya DBH, termasuk

kemungkinan tidak dapat membayar upah 7.000 anggota Laskar Pelangi, tim Pelayanan Publik Terintegrasi yang dibentuk Pemkot Makassar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Andi Zulkipli Nanda menambahkan, DBH merupakan pendapatan penting yang bersumber dari transfer pemerintah pusat melalui provinsi.

Penundaan penyaluran ini, menurutnya, memengaruhi pelaksanaan program-program prioritas dan menurunkan

target pendapatan daerah. "Kami harus mengevaluasi kembali program yang direncanakan, bahkan merasionalisasi beberapa kegiatan," katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakhrulloh, mengakui bahwa pembayaran DBH 2024 belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan anggaran.

Prof. Zudan menyebutkan, anggaran 2024 hanya cukup untuk 12 bulan, sementara sisa kewajiban akan dibayarkan pada 2025. "Saya mohon maaf karena belum bisa menyele-

saikan semuanya. Tapi tahun 2025, sesuai desain APBD, seluruh kewajiban DBH sudah bisa dianggarkan," jelasnya.

Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin juga mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyatakan, DBH untuk Kota Makassar sudah dibayarkan hingga April 2024, termasuk sebagian tunggakan 2023, dengan total Rp210 miliar lebih.

"Kami mohon maaf belum bisa maksimal tahun ini, tapi tahun 2025 akan kami upayakan penyelesaian," akunya. (eky/rif)